STUDIA SOSIA RELIGIA

Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2021 E-ISSN: 2622-2019 http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr

KHARISMA KEPEMIMPINAN TOKOH AGAMA PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN GEREJA DI TAPANULI BAHAGIAN UTARA (ANALISIS SOSIOLOGIS)

Harisan Boni Firmando Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung boni.harisan@iakntarutung.ac.id

Abstrak

Interaksi dalam masyarakat diupayakan terjalin dengan baik guna mewujudkan harmoni sosial. Perwujudan harmoni tersebut tidak terlepas dari kehadiran tokoh agama yang merupakan pemimpin dan penggerak masyarakat. Bagi masyarakat Batak Tobaseorang pemimpin adalah pribadi yang disukai dan diteladani. Pemimpin memilikikharisma kepemimpinan yang berfungsi sebagai penganyom dan pemersatu, sehingga menjadi seseorang yang diteladani, dihormati dan dipatuhi. Rendahnya partisipasi jemaat dalam pelayanan Gereja dan minimnya kehadiran jemaat mengikuti kegiatan ibadah menjadi tantangan bagi eksistensi Gereja Gereja sebagai organisasi sosial membutuhkan pemimpin yang cakap, dapat diandalkan dan menjadi teladan agar Gereja dapat berkembang dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, studi dokumen dan focus group discussion (FGD). Unit analisis dan informan adalah masyarakat di daerah Tapanuli Bahagian Utara. Data ditafsirkan menggunakan catatan lapangan.

Kata Kunci: Kharisma, Kepemimpinan, Perkembangan Gereja

Abstract

Striving for interaction in society is well-established in order to create social harmony. The realization of this harmony is inseparable from the presence of religious figures who are leaders and mobilizers of society. For the Toba Batak community, a leader is a person who is liked and emulated. The leader has a leadership charisma that functions as a singer and unifier, so that he becomes someone who is emulated, respected and obeyed. The low participation of the congregation in Church services and the minimum attendance of the congregation in participating in worship activities are a challenge to the existence of the Church. The Church as a social organization needs leaders who are capable, reliable and who are role models so that the Church can develop properly. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. Data were collected by observation, interviews, document study and focus group discussion (FGD). The unit of analysis and informants is the community in the North Tapanuli Bahagian area. Data interpreted using field notes.

Keywords: Charism, Leadership, Church Development

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri 34 provinsi. Sumatera Utara merupakan salah provinsi di Indonesia yang memiliki 33 kabupaten dan kota. Dua dari 33 kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba. Mayoritas penduduk kabupaten Tapanuli Utara memeluk agama Kristen, sebagian kecil beragama Islam dan Budha. Suku asli di kabupaten Tapanuli Utara yakni Batak Toba umumnya memeluk agama Kristen Protestan dan sebagian memeluk Katolik, Islam dan kepercayaan asli suku Batak yaitu Parmalim. Sekitar 95,09% penduduk Tapanuli Utara memeluk agama Kristen, kemudian Islam 4,76% yang banyak bermukim di Garoga, dan Pahae, kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dimana banyak diantara adalah suku Batak Angkola atau Mandailing. Sebagian kecil memeluk agama Buddha 0,05% dari etnis Tionghoa dan sebanyak 0,01% masih memegang kepercayaan Parmalim(www.taputkab.go.id).

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 sebesar 312.758 jiwa yang terdiri dari 156.176 jiwa laki-laki dan 156.582 jiwa perempuan (BPS Kabupaten Tapanuli Utara 2021: 48), yang tesebar di 15 Kecamatan. Sarana ibadah umat beragama di Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut: Gereja Protestan 709 unit, Gereja Katolik 77 unit, Mesjid 65 unit, dan Mushola 35 unit (BPS Kabupaten Tapanuli Utara, 2021: 72) .

Kabupaten Toba merupakan Kabupaten yang mekar dari Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1998. Jumlah penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2020 adalah 206.199 jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan(BPS Kabupaten Toba 2021: 78). Jumlah rumah ibadah menurut jenis rumah ibadah tahun 2020 di Kabupaten Toba sebagai berikut : gereja Protestan sebanyak 445 gereja, gereja Katolik sebanyak 64 gereja, 44 mesjid, mushola sebanyak 1. Selain itu di tahun 2020 terdapat sekitar 182.853 umat beragama Kristen dan 15.673 umat beragama Khatolik. Umat yang beragama Muslim sebanyak 12.615, Hindu 6 orang, Budha 65 orang, Konghucu 2 orang dan lainnya 3.061 orang (BPS Kabupaten Toba, 2021: 127).

Interaksi dalam masyarakat diupayakan terjalin dengan baik guna mewujudkanharmoni sosial. Perwujudan Harmoni tersebut tidak terlepas dari hadirnya figur tokoh yang dapat menggerakkan masyarakat mewujudkan keharmonisan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada seseorang yang dianggap masyarakat sebagai tokoh dimana orang tersebut disegani dan didengarkan arahannya oleh masyarakat. Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atautokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional (Furchan dan Agus, 2005: 11).

Tokoh agama merupakan seseorang yang berilmu terutama dalam ilmu agama. Tokoh agama dijadikan sebagai teladan dan rujukan ilmu agama bagi masyarakat. Pengaruh tokoh agama sangat besar dan dalam beberapa hal masih sangat menentukan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Hal inilah yang menjadikan seorang tokoh pada umumnya menjadi seorang pemimpin di dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan termasuk dalam organisasi agama.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah atau organisasi ditentukan pula oleh keterlibatan tokoh agama, dimana tokoh agama dianggap

mampu menggerakkan masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat. Besarnya pengaruh yang dimiliki oleh tokoh agama tidak terlepas dari figur seorang tokoh tersebut, yang mencakup perilaku tokoh yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat umum.

Perilaku seorang pemimpin dalam memimpin kelompok atau masyarakat disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu upaya pemimpin agar tujuan bersama dapat direalisasikan melalui orang lain dengan cara berkomunikasi, berkerja sama, dan memotivasi orang lain agar dapat melaksanakan program bersama dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan bersama. Kepemimpinan menjadi kunci dalam membangkitkan, memajukan bahkan dapat menghancurkan sebuah kelompok, masyarakat atau organisasi, termasuk organisasi Gereja.

Kepemimpinan yang kuat menjadikan Gereja berakar dengan kuat, bertumbuh dan berkembang luas. Kepemimpinan yang baik menggerakan jemaat untuk hidup meneladani Kristus dan bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Womack dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa unsur kepemimpinan dalam gereja memiliki korelasi positif dengan kuantitas dan kualitas dalam gereja (Womack, 1977: 79). Melalui kepemimpinannya seorang Tokoh Agama dapat mendorong jemaatnya melalui pembinaan dan tuntunan yang dilakukannya untuk hidup dalam kebenaran dan aturan yang ada dalam Gereja.

Dalam kenyataan di masyarakat tidak semua gereja memiliki kepemimpinan yang kuat, bahkan saat ini banyak Gereja mengalami krisis kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan menjadi salah satu persoalan yang dapat berdampak terhadap perpecahan gereja. Kepemimpinan seringkali diidentikan dengan suatu kekuasaan dan wewenang, sehingga dalam organisasi Gereja pemimpin seringkali memaksakan kehendaknya kepada setiap orang yang dipimpinnya, sehinggaada anggapan jemaat dipaksa untuk melakukan apa yang dikehendaki pimpinan Gereja.

Kepemimpinan sebenarnya bukanlah berbicara tentang suatu kedudukan atau jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh. Namun banyak orang memiliki konsep yang salah mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan selalu diidentikkan dengan jabatan atau kekuasaan. Kepemimpinan berasal dari pengaruh dan yang tidak dimandatkan (Maxwell, 1995: 1). Kepemimpinan sebagai suatu pengaruh, di mana pemimpin berupaya untuk memberikan pengaruh agar dapat menggerakkan jemaat yang dipimpinnya menjadi satu kesatuan, sehingga dapat menghadirkan tujuan bersama.

Mengingat pentingnya perilaku pemimpin dalam suatu Gereja yang telah dijabarkan di atas, maka penulis memfokuskanpembahasanpenelitian tentang bagaimana kharisma kepemimpinan yang dimiliki oleh para tokoh agama. Secara khusus penelitian ini meneliti tentang bagaimana kharisma kepemimpinan para tokoh agama menurutkearifan lokal masyarakat Batak Toba, serta mengukur apakah masih relevan kharisma kepemimpinan berbasis kearifan lokal tersebut terhadap tumbuh kembang pelayanan Gereja saat ini.

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara,

studi dokumen dan *focus group discussion* (FGD). Kriteria individu yang menjadi informan kunci adalah tokoh adat dan tokoh agama yang merupakan pengurus dalam perkumpulan sosial seperti perkumpulan marga, serikat tolong menolong dan gereja. Sedangkan informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung yaitu masyarakat, pengurus gereja dan generasi muda yang langsung merasakan hidup sebagai anggota masyarakat Batak Toba. Studi ini dilakukan di Empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Balige di Kabupaten Toba, serta Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilihan empat Kecamatan tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan kampung halaman masyarakat Batak Toba dan daerah awal perkembangan Kekristenan di Sumatera Utara sehingga masyarakat mengetahui bagaimana kehadiran kharisma kepemimpinantokoh agama dapat mendukung perkembangan Gereja.

Hasil dan Pembahasan Sistem Wilayah Pada Masyarakat Batak Toba Tradisional

Wilayah masyarakat batak tradisional terdiri atas beberapa tingkatan yaitu: Huta, Lumban/horja dan Bius, dalam tiap tingkatan dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai tugas tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Wilayah huta bagi orang Batak secara umum berarti kampung. J.C. Vergouwen mendefenisikan makna huta (kampung) bagi orang Batak Toba sebagai: "sebuah dunia kecil yang tertutup, satu kesatuan yang hidup dan terdiri dari sekelompok kecil orang yang terikat satu sama lain secara alami, dan sudah lama hidup di tempat ini, tempat anak-anak mereka lahir, tempat yang diharapkan menjadi kuburan mereka sendiri" (Vergouwen, 1985: 119).

Ciri yang menonjol dari umumnya huta (kampung) orang Batak, umumnya dikelilingi oleh parik (tembok yang terbuat dari tanah atau batu) yang tingginya sampai dua meter dan lebar satu meter. Keliling huta (tembok) biasanya selalu ditanami oleh pohon bambu duri yang gunanya sebagai benteng untuk melindungi huta dari serangan musuh (Simanjuntak, 2006: 165). Huta merupakan tempat tinggal dari orang Batak yang berasal dari satu nenek moyang (satu ompu) dengan atau tanpa boru. Marga pendiri huta disebut marga raja (marga tano). Marga-marga lain yang tinggal di buta dinamakan marga boru, mereka ini tidak mempunyai hak atas tanah. Huta didirikan oleh satu marga raja dan di dalam setiap huta Batak terdapat raja huta yaitu seorang dari pendiri huta. Raja huta didampingi oleh pandua (orang kedua, wakil) serta seorang dari boru yang ikut bersama dengan marga raja. Bila satu huta sudah dianggap padat, orang mengatasinya dengan mendirikan huta baru yang disebut sosor/pagaran. Alasan lain mendirikan huta karena ada pertentangan atau perkelahian di antara penghuni sebelumnya. Demikian dengan keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik atau karena ingin mandiri (manjae) dan memiliki kerajaan sendiri bebas dari kekuasan huta induk (Tampubolon, 1968: 7).

Horja adalah struktur dan organisasi wilayah yang terdiri dari beberapa wilayah huta, di mana kepala/pimpinan horja dinamakan sebagai raja parjolo (raja terdepan) yang didampingi oleh beberapa raja partahi (raja perencana). Dalam masyarakat Batak, pesta horja hanya dilaksanakan oleh mereka yang semarga. Horja sebagai sebuah federasi atau persekutuan bersama yang dibentuk oleh beberapa kampung (huta) dan sifat persekutuan itu adalah otonom. Federasi huta yang disebut sebagai horja hampir selalu memiliki kampung induk. Horja merupakan unit yang masing-masing terikat satu dengan yang lain secara kesilsilahan, meskipun di antaranya terselip maraga-marga lain yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga.

Horja berhak mengikat janji dengan horja lain, misalnya untuk kepentingan bersama antara lain pertahanan. Awalnya, federasi horja adalah masyarakat kurban, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi masyarakat hukum, yang secara langsung mengurus kepentingan duniawi warganya (Siahaan, 2005: 154).

Bius adalah struktur wilayah dari sistem pemerintahan harajaan (kerajaan) Batak dengan wilayah tertentu dan mempunyai rakyat serta pemerintahan. Bius adalah tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dalam masyarakat Batak Toba dan pemerintahan bius sangat bersatu dengan ugamo dan adat. Wilayah bius terdiri dari beberapa horja. Kepala dan pimpinan bius disebut sebagai raja doli. Bius merupakan kesatuan pemujaan (sombaon), banyaknya masalah yang tidak dapat ditangani oleh horja karena berada di luar kemampuannya (seperti musim kering yang sangat panjang, penyakit kolera yang mewabah, masa panceklik dan panen yang gagal dan lain sebagainya), maka untuk memohon belas kasihan serta perlindungan maka penduduk membentuk kelompok yang beranggotakan semua marga yang tinggal diwilayah yang tertimpa bencana. Persekutuan inilah yang disebut sebagai bius. Bius merupakan gabungan beberapa horja yang terdapat dalam satu kesatuan teritorial yang memiliki identitas sosial tertentu. Marga-marga yang menjadi anggota suatu bius memiliki wilayah yang berbeda. Karena itu mereka merasa bahwa sombaon yang terdapat di wilayah mereka harus dipuja secara bersama-sama, supaya dewata dapat memberi beri berkat dan ketenteraman di antara mereka (Simanjuntak, 2006: 186).

Kepemimpinan Pada Masyarakat Batak Toba Tradisional

Kepemimpian *huta* diwariskan dari nenek moyang kepada anak cucu, artinya kepemimpinan *huta* harus tetap di tangan marga raja (pendiri kampung). Raja *huta* mengurus segala keperluan di *huta* secara musyawarah dengan saudara-saudaranya serta *boru* termasuk mengatur pendirian rumah di dalam huta juga menghukum orang yang membuat keonaran. Raja *huta* berhak penuh dan mutlak mengatur hutanya dan biasanya pola pemerintahan huta bagi orang Batak ini sangat otonom (Tampubolon, 1968: 7).

Raja *Parjolo* sebagai pimpinan *horja*, menurut tugasnya berhak menyatakan perang dan mengatur pekerjaan-pekerjaan besar yang ada kaitannya dengan kepentingan anggota. Mengatur persiapan *horja rea* (pesta persembahan besar) dan membawakan doa-doa ritual (*martonggo*) walau pemimpin upacara *martonggo* tetap ada pada *parbaringin*. Tugas dan wewenang *parbaringin* dalam ritual keagamaan adalah mempersembahkan kurban kepada "*Debata Mula Jadi Na Bolon*, *sombaon* dan roh leluhur". Selama menjalankan tugasnya *parbaringin* harus menyisipkan ranting beringin di serbannya, inilah sebagai simbol mengapa ia disebut parbaringin (*parsanggul beringin*) (Siahaan, 2005: 156-157).

Pusat kegiatan bius disebut dengan parbiusan (tempat persidangan raja-raja bius). Setiap keputusan raja-raja bius adalah sah dan mutlak menjadi keputusan rumpun keluarga yang diwakilinya dan apa yang disetujui mereka menjadi persetujuan dari rumpun keluarga. Untuk merencanakan dan menata pembangunan demi kesejahteraan rakyat bius, raja-raja bius memilih raja na opat bius sesuai dengan keahliannya berfungsi merencanakan dan menata mengenai bidang kepercayaan rakyat bius. Raja na opat bius, yakni: Pertama, raja adat berfungsi merencanakan dan menata mengenai uhum/hukum dan adat. Kedua, raja parbaringin berfungsi merencanakan dan menata mengenai bidang sosial politik dan keamanan bius. Ketiga, raja bondar berfungsi merencanakan dan menata mengenai perekonomian bius. Keempat, pimpinan bius yang disebut "ulu bius" dipilih raja-raja bius. Ulu bius ini pada

mulanya disebut *ihutan*, yang dituakan dan kemudian berkembang menjadi raja adat, pimpinan keagamaan dan pimpinan pemerintahan.

Raja-raja bius menurut fungsinya berasal dari raja jolo marga dan dapat diwakili anak sibulang-bulangan (pilihan) marga. Raja bius adalah wakil-wakil dari horja. Raja-raja bius inilah sering disebut partuho mangajana yaitu pemilik hikmat kebijaksanaan masyarakat umum sesuai dengan masing-masing marga. Masing-masing raja bius memilih uluan melalui masyarakat horja. Uluan adalah pemimpin pelaksana dari satusatu horja dari kesatuan marga pada lumban (beberapa huta). Raja-raja bius berfungsi sebagai wakil rakyat dan menjadi penyelenggara pemerintahan yang dipercayakan kepada raja na opat bius. Uluan sebagai pelaksana pada horja menugasi para parhobas (pelayan) sesuai dengan kemampuannya. Raja-raja na opat bius membuat rencana rutin tahunan program kegiatan untuk dilaksanakan uluan horja tiap tahunnya.

Seseorang dapat menjadi raja ihutan berdasarkan keturunan, yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, ada raja ihutan yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan. Hal itu terjadi karena keturunan raja ihutan sebelumnya dianggap tidak kayak memangku jabatan sebagai raja, misalnya karena dipandang tidak bijak dan kurang memiliki wawasan sebagaimana diharapkan, yang harus dimiliki seorang raja ihutan(Lumbantobing, 2018: 96). Kedudukan Ihutan adalah untuk mengayomi program. Raja-raja bius di dalam kesepakatan pada mangajana (sidang umum) menetapkan semua hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat bius, misalnya dalam hal perburuan, perikanan, semua bentuk gotong royong. Semua perintah dari harajaon Batak disampaikan kepada ihutan melalui raja maropat dan diteruskan ke bius. Semua perintah itu dilaksanakan dengan konsekwen dan dirasakan oleh masyarakat apabila perintah (tona) tidak dilaksanakan akan mendatangkan bala. Menyangkut hukum perdata maupun pidana (termasuk adat) ada di tangan raja-raja bius setelah mendengar panimbangi (penasehat) dan ihutan. Kuasa menyetujui dan untuk melaksanakan suatu ketetapan berada di tangan raja-raja bius.

Sahala; Kharisma Kepemimpinan Dalam Kepribadian Seseorang

Dalam kaitannya dengan jiwa dan roh, orang Batak mengenal tiga konsep, yakni: tondi, sahala, dan begu. Tondi adalah jiwa atau roh yang dimiliki manusia itu sendiri yang menyebabkan dirinya dapat hidup atau memperoleh kekuatan hidup. Sahala adalah jiwa atau roh yang dimiliki manusia yang menggambarkan tuah atau kesaktian seseorang. Beda antara sahala dengan tondi ialah bahwa semua manusia yang hidup memiliki tondi. Namun, sahala manusia itu berbeda-beda kualitasnya dan bisa bertambah atau berkurang.

Sahala yang dimiliki seorang raja, datu, dan orang-orang tertentu yang memiliki keahlian atau keterampilan yang istimewa, lebih tinggi dibandingkan dengan sahala dari orang biasa. Demikian juga sahala yang dimiliki hula-hula dianggap lebih tinggi dari sahala yang dimiliki boru. Berkurangnya sahala yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan dirinya kurang disegani, bahkan kurang dihormati. Bila dia seorang dukun atau datu, maka dia semakin berkurang kemampuan kedatuannya (Simanjuntak, 2015: 170-18).

Sahala mempunyai makna yang luas. Apabila kata sahala diartikan ke dalam bahasa yang lain hampir tidak ada padanan kata yang cocok dengannya. Meskipun dalam kamus bahasa Batak-Indonesia mengartikan sahala sebagai "kharisma" dan "wibawa", namun belumlah tepat dengan makna yang sesungguhnya. Vergouwen (1985: 95) memaknakan sahala sebagai daya khusus dari tondi (jiwa). Sahala tidaklah dapat dipelajari dan tidak pula dapat dipanggil untuk memperolehnya, melainkan ia

datang sendiri hinggap (*maisolang*) pada seseorang manusia tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. *Sahala* itu ada yang sifatnya menetap tinggal dan ada pula yang hanya sekedar singgah sekejap pada diri seseorang (Gultom, 2010: 192).

Wujud sahala adalah halus dan tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia dan tidak pula diketahui kapan masuk dan hingga pada diri manusia. Orang yang dihinggapi sahala disebut "marsahala" (yang mempunyai sahala). Jika seseorang disebut marsahala, itu bermakna bahwa sahala tadi telah menyatu dengan jiwa dan badannya. Apabila orang tersebut "berkata" dan "bergerak", maka apa yang dikatakan dan yang digerakkannya adalah perkataan dan gerak sahala yang sudah terintegrasi dengan dirinya. Pribadinya yang asli tidak akan dimunculkan melainkan pribadi Sahala. Dan pribadi sahala inilah yang senantiasa mewarnai sikap dan perilakunya setiap saat.

Ciri-ciri orang yang sudah *marsahala* dapat terlihat pada kehidupannya seharihari. Bisanya, orang yang dihinggapi *sahala*, akan terjadi perubahan pada dirinya terutama dari segi sikap dan perilaku. Dia akan selalu mengawasi dirinya dari hal-hal yang dapat merusak dirinya sendiri dan juga orang lain di mana saja pun berada. Di samping itu, pada masa-masa tertentu ada ada juga terjadi perubahan pada paras orang yang bersangkutan. Jika wajahnya sebelumnya tampak biasa-biasa saja, akan tetapi dengan hadirnya *sahala* itu pada dirinya akan tampak lebih berwibawa karena sudah mendapatkan siraman sinar kharisma.

Ciri lain yang menandakan seseorang memiliki sahala ialah adanya kemampuan pada dirinya untuk memberikan pertolongan kepada orang lain terutama di bidang pengobatan. Apabila ada seseorang yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan pengobatan, tetapi dengan datangnya sahala, maka dia mampu mengobati orang yang sakit. Sahala yang datang itu disebut sahala panguhati (pengobati). Itu berarti bahwa tugas mengobati ialah menjadi ulaonna (profesinya) selama sahala itu masih tetap bertahan pada dirinya. Bagi mereka yang memiliki sahala panguhati disebut datu (dukun) untuk laki-laki dan sihaso untuk sebutan perempuan. Semua mereka dipercayai telah mendapat pemberkatan dari Debata Mulajadi Nabolon (Tuhan Yang Maha Esa).

Ada juga orang yang mampu mangajari dan manuturi (mengajari dan menerangkan) serta manghongkop (memperjuangkan) tentang hal tertentu kepada manusia. Mangajari bermakna kemampuan dalam hal memberikan pengajaran dan pendidikan supaya orang dapat punya hati atau pengalaman (marroha), memiliki kepandaian, sementara manuturi bermakna kemampuan dalam hal memberikan arahan dan nasihat supaya orang lebih arif serta mampu memberikan bimbingan rohani kepada orang yang mempunyai sejumlah masalah termasuk neurosis (gangguan jiwa). Sedangkan manghongkop adalah sejenis kemampuan jiwa dan raga dalam hal memperjuangkan suku dan bangsanya termasuk mendamaikan pertikaian jika suatu ketika terjadi. Apabila masing-masing kemampuan ini ada pada seseorang, itu bermakna bahwa sahala yang datang adalah sahala pangajari (pengajari), sahala panuturi (penutur) dan sahala panghongkop (jiwa pejuang) (Gultom, 2010: 192-193).

Kharisma Kepemimpinan Pada Masyarakat; Raja Na Marsahala

Semua posisi fungsional dalam kehidupan masyarakat dan status sosial dalam struktur relasional budaya Batak selalu disebut raja. Dalam struktur kultural relasional hal itu disebut dalihan na tolu, yang terdiri dari unsur kekeluargaan Batak: dongan tubu, hula-hula, dan boru. Ketiga unsur relasi kultural ini disebut raja, sehingga ada raja ni dongan tubu (raja dari teman semarga), raja ni hula-hula (raja dari pihak marga

perempuan), dan raja *ni boru* (raja dari keluarga yang beristerikan semarga pihak lakilaki). Ada juga raja *ni dongan sahuta* (raja teman sekampung), bahkan raja *na ginokkon* atau raja *na ro* (raja dari undangan atau raja yang diundang). Penyebutan raja juga dikenal kepada pelaksana tugas-tugas fungsional yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, ada *raja parhobas* (raja pelayan), ada *raja bondar* (raja tali air atau irigasi), bahkan ada nama seseorang raja *napogos* (raja yang miskin). Di kalangan masyarakat Batak juga dikenal sebutan *tangko raja* (mencuri ala raja, secara raja). Pemakaian kata raja menunjukkan sifat perilaku (*pangalaho*/karakter) yang dimiliki seseorang.

Penyebutan raja terhadap pelaksana tugas-tugas fungsional dalam kehidupan sehari-hari tentu tidaklah sesuatu yang baru. Hal itu lumrah karena yang dituntut dan yang diharapkan dari seorang pelaksana tugas fungsional adalah karakternya, perilakunya, dalam bersikap dan bertindak, berkomunikasi dan berpikir tentang tugas yang diembannya. Dalam pemahaman raja sesuai dengan budaya Batak, peranan dan fungsinya tidak ada hubungannya dengan kekuasaan politis, struktur dan hierarki kepemimpinan. Raja yang dikenal dan dipahami dalam budaya Batak bukanlah raja politis. Dengan demikian, seorang raja, apa pun status sosialnya dan tugas apa pun yang diemban dan dilakukannya, haruslah seorang yang memiliki *sahala*, *wibawa*, dan terhormat. *Raja na marsahala* (raja yang memiliki *sahala*), adalah raja yang berwibawa, bijak, memiliki otoritas spiritual, sehingga menjadi contoh dan panutan di tengah masyarakat (Lumbantobing, 2018: 144-145).

Seorang raja *na marsahala* bukanlah hasil pemilihan. Bukan pula diperoleh karena hasil perjuangan, atau yang diperoleh dengan meraih pendidikan atau pengalaman. Raja *na marsahala* lahir dari suatu proses kehidupan yang panjang. Oleh karena ia lahir dari proses, maka *sahala* tersebut tidak datang dengan tiba-tiba pada diri seseorang. *Sahala* itu masuk ke dalam pribadi dan perilaku hidup seseorang. Namun, sejak dini seseorang dapat diarahkan agar kelak di kemudian hari menjadi raja *na marsahala*.

Dahulu, di setiap wilayah di Tanah Batak selalu ada raja *ihutan*, atau disebut juga *jaihutan*, yang memimpin wilayah tersebut. Seseorang dapat menjadi raja *ihutan* tidak berdasarkan keturunan, atau bukan warisan orang tua kepada anaknya. Raja *ihutan* diangkat berdasarkan hasil pemilihan raja-raja adat. Adakalanya otoritas, wibawa raja *ihutan* dapat tersalur kepada keturunannya, sehingga pengganti raja *ihutan* diangkat dari anaknya. Namun, dapat pula diganti, bahkan bila perlu menggantikannya sebelum masa waktu pergantian. Hal itu dapat terjadi apabila keturunan raja *ihutan* tersebut dianggap tidak layak memangku jabatan sebagai *jaihutan*, misalnya karena dipandang tidak bijak dan kurang memiliki wawasan sebagaimana yang diharapkan, yang haris dimiliki oleh seorang raja *ihutan* (Lumbantobing, 2018: 145-146).

Pemimpin *jaihutan* atau raja *ihutan* aslinya adalah model kepemimpinan daerah Batak, tidak merupakan dinasti. Akan tetapi, di kemudian hari seorang *jaihutan* ditetapkan sebagai hasil penunjukan atau pemilihan oleh masyarakat melalui pemimpin-pemimpin adat Batak yang terdapat pada satu *hundulan* (wilayah atau region) tertentu. Awalnya pemerintah kolonial Belanda mengakui, lalu kemudian menerima status jabatan *jaihutan* tersebut. Lama-kelamaan, pihak pemerintah kolonial Belanda yang mengadakan langsung pemilihan secara terbuka jabatan *jaihutan*. Tentu saja hal itu dimaksudkan dalam rangka mengamankan calon *jaihutan* agar sesuai dengan yang dikehendakinya (Castle, 2001: 26).

Kharisma Kepemimpinan Dalam Keluarga; Ama Na Marsahala

Keberadaan seorang bapak di dalam keluarga mempunyai wibawa secara kultural. Bapak di dalam kehidupan keluarga bukan hanya sekedar pencari nafkah kehidupan. Bapak adalah seorang pelindung, penjaga, pengayom, pendidik dan pemberi nasihat kepada seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, peranan dan fungsi seorang bapak di dalam keluarga dapat menentukan akhlak dan moralias kehidupan masyarakat secara umum. Peranan dan fungsi seorang bapak di dalam kehidupan keluarga itu didukung dengan peranan dan fungsi bapak di dalam komunitas kultural, sosial, dan kehidupan religiositas yang ada dan bertumbuh dalam masyarakat.

Hampir di semua budaya suku bangsa dan agama menempatkan kaum bapak sebagai pemimpin spiritual, atau imam, sesuai dengan ritus keagamaan yang dianutnya. Hal itu disebabkan mayoritas suku menganut paternalistik, mengambil garis keturunan dari pihak bapak. Itu sebabnya kaum bapak selalu didahulukan, dinomorsatukan, dan diutamakan daripada kaum perempuan. Kaum laki-laki telah diutamakan dan diunggulkan hanya karena kelahirannya sebagai anak laki-laki. Sebaliknya, kaum perempuan selalu dinomorduakan setelah laki-laki, hanya karena kelahirannya sebagai perempuan.

Kaum bapak yang selalu diharapkan dan diidam-idamkan masyarakat adalah ama na marsahala (bapak yang berwibawa). Kata sahala dalam budaya Batak sangat dalam arti dan maknanya. Secara terminologi dan etimologi, kata itu sama dengan mana, dalam arti suatu wibawa, harkat, dan martabat yang diperoleh berdasarkan kejujuran, perbuatan baik, dan otoritas yang dimiliki berdasarkan tindakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran terhadap orang lain. Dengan demikian, makna wibawa atau sahala tidak diperboleh berdasarkan usaha, tetapi berdasarkan harkat dan martabat, tindak kejujuran dan keadilan, perbuatan cinta kasih dan pengorbanan terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat banyak (Lumbantobing, 2018: 480-481).

Harus diakui bahwa peran bapak sangat dominan di dalam kehidupan keluarga, namun dalam realita kehidupan, semua elemen dalam keluarga sangat menentukan pembentukan keutuhan harmonisasi keluarga. Artinya, peranan ibu dan anak sebagai anggota keluarga tetap sebagai faktor penentu dalam membentuk keluarga sejahtera dan harmonis. Bahkan, kehadiran anggota keluarga dari pihak suami dan istri, bahkan juga pembantu rumah tangga, yang hidup di dalam satu keluarga turut menentukan keharmonisan dan kebahagiaan suatu keluarga. Oleh karena itu, bukan hanya unsur bapak, ibu dan anak saja yang menentukan kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan suatu keluarga, tetapi semuanya, bapak, ibu, dan anak. Mereka adalah suatu tim di dalam membentuk hidup harmonis keluarga.

Seorang bapak adalah kepala keluarga, imam spiritual semua anggota keluarga, dan oleh karenanya menjadi pemimpin kehidupan jasmani dan rohani keluarga. Dengan demikian, seorang bapak di dalam keluarga adalah pemegang tongkat kendali kepemimpinan, penentu arah kehidupan bersama dan menjadi pemimpin di dalam keluarga. Peranan dan kedudukan strategis ini harus dibarengi dengan pola hidup, karakter, dan perilaku seorang kaum bapak. Itu sebabnya, di dalam cita-cita dan harapan kehidupan Batak, seorang bapak itu adalah; sitiop hatian na so ra teleng (pemegang batu timbangan yang tidak dapat diubah), pamuro na so marbatahi (penjaga lading yang tidak perlu pakai tongkat), hasahatan ni panungkunan (tempat penyampaian berbagai pertanyaan), parsali ni pangidoan (tempat pemimjaman permohonan), simemehon poda (pemberi nasihat), sitiop habonaran (pemegang

kebenaran), *ulubalang ni harajaon* (panglima kerajaan). Semua hal ini dapat terjadi karena di dalam karakter dan kehidupan pribadinya ada kebenaran, keadilan, kasih dan jiwa kepemimpinan yang melindungi semua pihak. Figur seorang bapak seperti itulah yang dimaksudkan sebagai seorang bapak yang memiliki wibawa (*ama na marsahala*).

Kharisma Tokoh Agama Pada Awal Pertumbuhan Gereja di Tapanuli Bahagian Utara

Nommensen adalah Ephorus (pimpinan tertinggi) pertama Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang memulai penyebaran Agama Kristen dari Pearaja, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu kebijakan Nommensen sebelum memulai misinya, yaitu melakukan pendekatan terhadap tokoh dan para raja setempat. Sebelum melaksanakan tugas dan maksud kedatangannya, Nommensen selalu terlebih dahulu berupaya membangun relasi akrab, bersahabat, dan membangun hubungan harmonis dengan para pemimpin lokal yang diyakini sebagai pemimpin formal dan informal, yang diyakininya memiliki wibawa dan kharisma kepemimpinan terhadap masyarakat setempat.

Beberapa raja Ihutan aktif mendukung pemberitaan Injil dengan turut serta menghimbau rakyatnya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat. Raja ihutan atau jaihutan tersebut turut berpartisipasi dan mendorong rakyatnya dengan memerintahkan kepala kampung yang ada di wilayahnya agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan gereja dan kegiatan lainnya (Lumbantobing, 2018: 146).Dengan demikian kekristenan maju pesat karena penginjilan didukung oleh raja ihutan. Dari kondisi ini diketahui bahwa masuknya orang Batak menjadi Kristen lebih disebabkan keputusan rajanya daripada keputusan pribadi. Kasus Raja Pontas Lumbantobing dan Raja Amandari juga demikian. Kedua raja tersebut mendorong rakyatnya untuk menerima Injil Kristus, sekalipun mereka baru belakangan masuk dan menerima kekristenan. Hal itu sejajar dengan metode penginjilan yang dilakukan Nommensen, yaitu dengan metode menjala dan bukan dengan metode memancing. Hasilnya dapat dilihat dalam sifat kekristenan Batak masa kini, yang sangat kuat sebagai Kristen kolektif, tetapi lemah sebagai Kristen individual (Lumbantobing, 2018: 96).

Dalam usaha Pekabaran Injil di tengah masyarakat yang masih beragama suku, pengabdian para hamba Tuhan, khususnya penatua jemaat menjadi faktor dasar lain untuk Gereja suku. Pengangkatan penatua-penatua berkaitan dengan tata desa. Dalam desa Batak tradisional, orang-orang yang disebut pangituai adalah bapak-bapak yang sudah lanjut usianya, yang merupakan rapat para tua-tua, diketuai oleh raja dan harus merundingkan dan memutuskan urusan-urusan penting dari desa itu, seperti pesta, perselisihan, perkara dan pembangunan desa baru. Walaupun dalam pekabaran Injil di kalangan orang Batak-Islam di Angkola jabatan penatua Kristen sudah hampir dilembagakan, namun barulah Nommensen dan Johannsen di Silindung yang memberi kepadanya sifat yang khas sebagai daya pendorong dan tiang pendukung gereja. Nommensen menunjuk dalam jemaatnya yang pertama empat orang sebagai penatua untuk membantu dalam penggembalaan, perawatan orang sakit dan dalam pelayanan pemberitaan firman. Para penatua itu memenuhi tugasnya secara sukarela, tanpa imbalan materil: mereka adalah tenaga yang tidak terdidik. Dengan cara ini dijelaskan kepada jemaat-jemaat muda itu dari sejak semula, bahwa kepercayaan Kristen adalah perkara mereka sendiri, yang untuknya mereka memikul tanggung jawab tertentu. Jemaat-jemaat itu sendiri, masing-masing di tempatnya, menjadi pusat persekutuan Kristen, sehingga anggota-anggotanya tidak dapat menjadi pengikutpengikut sang zendeling, yang secara batiniah dan lahiriah berkiblat kepada pos pekabaran Injil saja (Schreiner, 2011: 49).

Ketika suasana kehidupan di Silindung menjadi lebih teratur dan lebih stabil, maka para pendeta utusan mulai mengangkat dua orang penatua dalam setiap kampung. Mereka harus mencurahkan perhatian dan tenaga kepada keadaan dan kemajuan agama Kristen di desa itu, disamping itu para penatua ditugaskan untuk mengadakan kunjungan yang teratur kepada kampung-kampung tetangga yang masih beragam suku. Penatua itu diutus berdua atas dasar sukarela. Di kampung yang kebanyakan penduduknya masih *parbegu*, para penatua itu mewakili gereja. Di kampung-kampung yang di dalamnya telah didirikan jemaat-jemaat cabang, kehidupan jemaat berkisar di sekitar mereka, malahan merekalah yang menjadi "gembala yang sebenarnya" dari jemaat-desa itu (Lumbantobing, 1961: 56).

Dalam dasawarsa pertama zending tidak terbayangkan beratnya menjadi sintua, yakni penatua jemaat, karena hal itu berarti menjadi pembantu-zendeling. Tetapi dengan semakin mantapnya kekuasaan kolonial maka jabatan itu menjadi suatu jabatan yang disukai" (Lumbantobing, 1961: 105).Dengan bertambahnya jumlah keluarga maka diangkatkah para penatua menurut patokan tertentu, yaitu satu orang penatua untuk setiap 25 keluarga. Dalam daerah-daerah yang sudah dikristenkan itu masih berlangsung terus lembaga pangintuai desa; para penatua jemaat tidak sama dengan mereka, walaupun mereka ini juga pada umumnya diakui sebagai orang yang terhormat. Pada mulanya para penatua jemaat itu diangkat untuk dua tahun. Mulai dengan abad ini jabatan penatua berkembang menjadi suatu kedudukan seumur hidup, kendatipun itu hanya suatu kedudukan kehormatan. Dari sudut etnologi agama, maka jabatan pangituai yang lama diganti dan dirombak menjadi jabatan penatua jemaat gereja-suku. Dengan demikian Rheinische Mission telah menyedikan dan memberikan kepada kaum awam suatu peranan yang asasi dalam pengkristenan suku bangsa itu secara intensif maupun secara ekstensif. Dalam kesadaran rakyat, penatua jemaat itu telah menjadi soko guru gereja setempat (Lumbantobing, 1961: 52-57).

Secara ringkas harus ditonjolkan dalam jabatan penatua itu faktor kepengaturan dan kepemimpinan yang berdikari dalam jemaat kampung. Kepada beberapa orang di dalam persekutuan itu diberikan kesempatan dan tugas untuk sendiri mengambil prakarsa, untuk sendiri memberi pimpinan (Abraham, 1934: 95). Jadi, para pendeta utusan di sini bersandar pada suatu lembaga-adat tertentu. Menurut alasan, fungsi dan tujuannya, jabatan itu merupakan suatu faktor kemasyarakatan yang baru. Perlu ditonjolkan bahwa sifat para pejabat sebagai orangorang yang diutus, yang mempunyai suatu amanat keluar, merupakan sesuatu yang baru juga bagi pandangan hidup bangsa-bangsa purba. Yang menjadi kesamaan dengan lembaga adat tersebut ialah adanya wibawa, kehormatan dan tangggung jawab untuk umum (Schreiner, 2011: 47).

Kharisma Kepemimpinan Tokoh Agama dalam Gereja Masa Kini

Praktek kepemimpinan Batak merupakan sebuah sistem, maka di dalamnya ada persyaratan fungsi yang harus dipenuhi sebagai sebuah sistem. Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem, Adaptasi (A), Goal attainment/pencapaian tujuan (G), Integrasi (I) dan Latency (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema

AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut (Ritzer, 2004: 256).

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut; 1). Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokoktersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi; 2). Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya; 3). Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya (Soekanto, 2010: 256).

Pelaksanaan skema AGIL diperlihatkan melalui sistem dalihan na tolu, bius, horja dan huta, beberapa hal ini menjadi landasan normatif yang memperlihatkan konsep keseimbangan di dalam kebudayaan Batak Toba. Keseimbangan sistem: bius, horja, huta dan dalihan na tolu, menjadi sudut pandang (world view) masyarakat Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pelayan Gereja keseimbangan sistem dapat dilihat pada sistem organisasi Gereja: Pusat, Distrik/Wilayah, Ressort, Jemaat, Lingkungan.

Salah satu legitimasi kekuasaan kepemimpinan tradisionil secara sosiologis adalah wibawa (*sahala*: kharisma) (Suseno, 2000: 59). Dalam masyarakat Batak Toba tradisionil legitimasi kekuasaan melalui kharisma/wibawa inilah yang paling menonjol di mana keberhasilan kepemimpinan sangat ditentukan oleh rasa hormat dan kagum terhadap pribadi yang mengesankan, sehingga membuat orang lain yang dipimpin menjadi taat/patuh. Dalam hal ini, legitimasi merupakan keyakinan yang ada dan hidup di dalam sebuah konteks serta dilakoni masyarakat dengan penuh kesadaran bahwa seorang pemimpin itu memang wajar dan patut dipatuhi dan dihormati.

Kharisma kepemimpian tokoh agama pada awal perkembangan Kekristenan di Tapanuli Bahagian Utara sangat tinggi bila bandingkan dengan kharisma kepemimpinan tokoh agama di masa kini. Pada awal perkembangan Kekristenanpara raja dan masyarakat di berbagai daerah Tapanuli Bahagian Utara sangat menghormati para tokoh agama, dapat dilihat dari banyaknya dukungan yang diberikan kepada berbagai program organisasi Gereja. Para raja dan masyarakat memberikan tanah perorangan atau kelompok kepada organisasi Gereja untuk dijadikan rumah ibadah. Luas tanah yang dihibahkan biasanya sekitar 2 atau 3 hektar. Para pengurus Gereja tidak mengecewakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat tersebut, tanah yang sudah dihibahkan diberdayakan dengan konsep pargodungan. Pargodungan adalah pusat pelayanan holistik, yang melingkupi pelayanan rohani dan jasmani, di dalam lahan pargodungan didirikan berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah Gereja, sekolah, rumah sakit atau klinik dan rumah pengurus Gereja. Lahan pargodungan juga dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan pertanian dan peternakan.

Kharisma kepemimpinan tokoh agama masa kini masih sangat minim, dapat dilihat dari semakin berkurangnya rasa hormat jemaat kepada para tokoh agama. Dampak berkurangnya rasa hormat ini mengakibatkan rendahnya partisipasi jemaat dalam berbagai program pelayanan Gereja yang bermuara pada rendahnya angka kehadiran jemaat dalam mengikuti kebaktian setiap minggunya. Bila dianalisis minimnya kharisma tokoh agama tersebut disebabkan semakin berkurangnya keteladanan hidup yang dimiliki oleh para tokoh agama. Dalam menyikapi pelayanan

para tokoh agama telah berorientasi kepada uang dan mengganggap pelayanan di Gereja sebagai profesi bukan lagi sebagai panggilan pelayanan.

Motivasi pelayanan yang kurang tepat berakibat pada rendahnya kinerja para tokoh agama yang merupakan motor penggerak perkembangan Gereja. Belajar dari perjalanan sejarah Gereja di Tapanuli Bahagian Utara yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat para tokoh agama di masa kini diwajibkan berbenah diri, mengenali siapa dirinya dengan mengukur dan mengembangkan potensi yang dimiliki, serta yang terutama meneguhkan kembali panggilan pelayanannya agar dapat menjadi pelayan yang berkharisma, sehingga organisasi Gereja dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Menyikapi minimnya kharisma kepemimpinan tokoh agama saat ini diperlukan penanganan yang komprehensif agar perkembangan Gereja secara proporsional dapat tercapai. Organisasi Gereja perlu berbuat untuk memberi solusi terhadap minimnya kharisma kepemimpinan yang dimiliki oleh para tokoh agama. Solusi yang dilakukan dapat berupa program pembinaan kepada para pengurus Gereja. Program pembinaan dapat dilakuan secara rutin dan berkelanjutan, misalnya dilaksanakan per tri wulan atauper semester. Materi pembinaan yang rutin tersebut dapat dirancang secara berkelanjutan seperti dengan mengangkat topik; peneguhan tugas pelayanan, kepemimpinan yang melayani dan kepemimpinan transpormatif yang tetap berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan dilaksanakannya program pembinaan kepada para pengurus Gereja maka akan menggali dan menggembangkan beragam potensi yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat perlu pula dilakukan pembinaan kepemimpinan kepada anggota organisasi Gereja yang bukan pengurus Gereja sehingga dapat memunculkan tokoh agama yang baru dan terjadi regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan.

Penutup

Pimpinan tertinggi dalam birokrasi tradisional Batak Toba di masing-masing teritori disebut raja. Mereka memiliki kedudukan, kuasa dan wibawa yang khas yang berimplikasi terhadap hubungannya dengan rakyat dan dalam pengambilan keputusan. Kekhasan tersebut didasarkan atas nilai budaya kerohanian dan kemasyarakatan yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba. Kekhasan wibawa/kharisma yang didasarkan nilai budaya kerohanian dan kemasyarakatan dalam masyarakat Batak Toba disebut dengan sahala.

Kriteria seseorang yang memiliki *sahala* adalah; bijaksana dalam bertindak, adil terhadap semua orang, pengayom dan penggembala masyarakat, solider, pemerhati, dan siap memberi pertolongan kepada orang lain, memberi tumpangan, menjamu makan setiap tamu yang datang dan menjadi pembimbing dalam kehidupan. Seseorang dikatakan memiliki *sahala* apabila dia menjadi panutan (*tau sitiruon jala siihuthonon*) dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kriteria seperti itu dimiliki, maka orang tersebut, diakui, dan dipatuhi sebagai seorang pemimpin, dimana kepemimpinannya tidak bersifat politis, namun berdasarkan pada karakter dan perilakunya dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya jelas disimpulkan bahwa kharisma kepemimpinan tokoh agama pada masyarakat Batak Toba masih relevan hingga saat ini dari aspek teori dan prakteknya. Kharisma kepemimpinan dapat dilihat dari aspek sosiologis dan historis yang dialami masyarakat di Tapanuli Bahagian Utara. Pemimpin yang berkharisma dapat menjadi seorang motivator bagi jemaat sekaligus menjadi motor penggerak tumbuh kembang Gereja. Terlihat dari awal perkembangan Kekristenan di Tapanuli

Kharisma Kepemimpinan Tokoh Agama Pada Masyarakat Batak Toba Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Gereja Di Tapanuli Bahagian Utara (Analisis Sosiologis)

Bahagian Utara, setiap misionaris yang datang ke suatu daerah selalu terlebih dahulu mencari dan menemukan seorang tokoh masyarakat setempat yang berkharisma agar dapat menjadi pemandu dan pendukung tugas pekabaran Injil yang dilaksanakan, dampaknya dalam waktu yang cepat pertumbuhan Gereja di Tapanuli Bahagian Utara berkembang pesat hingga ke berbagai wilayah di Nusantara.

Daftar Pustaka

Abraham, Zanen Johannes Van. 1934. Voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling in het central Batakland. diss. Leiden.

BPS Kabupaten Tapanuli Utara. 2021. *Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2021*. Tarutung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara.

BPS Kabupaten Toba. 2021. Kabupaten Tapanuli Toba Dalam Angka 2021. Tarutung: Badan

Pusat Statistik Kabupaten Toba.

Castle, Lance. 2001. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia – KPG.

Furchan, Arief dan Agus Maimun. 2005. Studi Tokoh. Yogyakarta:Pustaka Belajar.

Gultom, Ibrahim. 2010. Agama Malim di Tanah Batak. Jakarta: Bumi Aksara.

Lumbantobing, Andar. 1961. Das Amt in der Batakkirche. Wuppertal-Barmen.

Lumbantobing, Darwin. 2018. *Tumbuh Lokal Berbuah Universal*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Maxwell, John. 1995. Mengembangkan Kepemimpinan di dalam Diri Anda. Jakarta: Binarupa

Aksara.

Ritzer, George. 2004. Edisi Terbaru Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Siahaan, Bisuk. 2005. Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu. Jakarta: Kempala Foundation.

Simanjutak, Bungaran Antonius. 2006. Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba,

Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Soekanto, Soerjano. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. Ke 43. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suseno, Frans M. 2000. Etika Politik. Jakarta: Gramedia.

Tampubolon, I. 1968. *Adat mendirikan Huta/Kampung*. Medan: Percetakan Philemon Siregar.

Vergouwen, J.C. 1985. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pusata Azet. Womack, David A. 1977. *The Pyramide Principle*. Minneapolis: Bethany Fellowship.